

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Tindakan kriminalitas atau kejahatan adalah bentuk dari tingkah laku masyarakat yang melanggar hukum dan dapat dijerat hukum pidana. Di Indonesia, orang yang melakukan tindak kriminalitas dapat dijerat hukuman dan dimasukkan ke dalam tahanan yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Undang-undang No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dinding tembok yang menjulang, bukan penghambat bagi para warga binaan untuk berkreasi dan berinovasi melakukan sesuatu yang berguna. Adanya harapan mengubah pandangan bahwa di dalam Lapas bukan sesuatu yang negatif, akan tetapi ada sisi positif yang bisa diupayakan. Dengan kehidupan dalam Lapas dapat menjadi inspirasi bagi warga binaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian agar ketika mereka bebas dapat diterima di masyarakat umum serta mampu mengembangkan keahlian yang dimiliki.

Pada dasarnya, Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Sebelum dikenal sebagai Lapas Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan biasa disebut narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih dalam masa peradilan. Maka dari itu, Lapas Tangerang menyelenggarakan berbagai macam pembinaan berupa pelatihan keterampilan hidup (*life skill*). Dari hasil pelatihan tersebut, diharapkan mampu menghasilkan produk-produk yang bisa diperjualbelikan atau dipasarkan ke masyarakat umum, sehingga kegiatan ini menjadi produktif. Dari pelatihan tersebut diharapkan para warga binaan mampu menjadi wirausaha meski hidup dalam Lapas.

Kemandirian adalah konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan dan menjadi faktor yang sangat penting di dalamnya. Dalam konteks ini, konsep kemandirian mencakup pengertian kecakapan diri di bidang ekonomi, sebagai implikasi atas keterkaitan unsur-unsur dalam kemandirian. Program-program yang

diselenggarakan selalu mengupayakan pemberdayaan bagi golongan miskin agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya sehingga memupuk kemandirian hingga menjadi pribadi yang kuat.

Di era globalisasi ini, setiap negara dituntut untuk membangun perekonomian menjadi semakin efektif, efisien, dan kompetitif. Saat ini, Indonesia termasuk negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Maka, upaya membangun dan memperbaiki sistem perekonomian negara dilakukan secara terus-menerus. Pembangunan yang sifatnya menyeluruh hendaknya dapat mengantarkan negara Indonesia pada pemerataan ekonomi bangsa di berbagai sektornya. Dengan demikian, pembangunan perekonomian negara ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Arus globalisasi menyebabkan semakin cepatnya perubahan yang terjadi di segala bidang, terutama di bidang perekonomian. Dengan demikian, sumber daya manusia di berbagai negara mengalami persaingan karena memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Sehingga, mengharuskan Indonesia menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN.

Pada era masyarakat ekonomi ASEAN, salah satu masalah yang dihadapi pada bangsa ini yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), ditinjau dari tingkat pendidikan. Hal tersebut menyebabkan rendahnya tingkat keterampilan sehingga menjadikan manusia di Indonesia tidak cukup mampu memaksimalkan potensi yang ada dan kurang siap bersaing dengan negara-negara di ASEAN lain.

Rendahnya kualitas SDM di Indonesia menjadi salah satu perhatian pemerintah dengan berbagai upaya yang dilakukan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di wilayah ASEAN. Salah satu upaya yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan SDM. Peningkatan SDM yang berkualitas membutuhkan manajemen dan strategi yang baik dilaksanakan dengan berbagai macam program pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, unggul, dan terampil sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain. Berkaitan dengan ini pemerintah berupaya membangun dan mengembangkan kualitas SDM melalui tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Jalur pendidikan tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1, disebutkan bahwa: “Jalur

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.

Ketiga jalur pendidikan tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 11, 12, 13, yakni: “Ayat (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Ayat (12) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang Ayat (13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.”

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pada pasal 26 ayat 3 menjelaskan bahwa: “Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

Kemudian, menurut Sudjana (2010, hlm. 184) kebutuhan pendidikan mengandung dua implikasi yaitu:

“(1) bahwa seseorang yang merasakan dan menyatakan keinginan untuk memiliki atau meningkatkan pengetahuan keterampilan, sikap, dan aspirasinya hanya dapat dicapai melalui kegiatan belajar yang terencana dan disengaja, (2) bahwa kebutuhan pendidikan yang dirasakan dan dinyatakan oleh seseorang merupakan ekspresi dari kebutuhan diri seseorang (*individual needs*), atau kebutuhan lembaga (*institutional needs*), dan kebutuhan masyarakat (*community needs*), bahkan bisa saja merupakan manifestasi dari ketiga macam kebutuhan tersebut yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.”

Banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap pendidikan hanya sebagai syarat mendapatkan ijazah untuk bekerja, bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa pendidikan merupakan hal yang kurang penting. Selain itu, beberapa masih menganggap tanpa pendidikan pun bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian masih ada juga yang berpikir dengan mengandalkan orang lain sehingga menjadikan individu yang tidak mandiri karena bergantung pada orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sebuah sistem pendidikan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara langsung dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehnya untuk dijadikan bekal mendapatkan

penghasilan. Sistem pendidikan yang tepat sebagai solusi atas permasalahan di atas adalah dengan pendidikan keterampilan.

Pendidikan keterampilan dapat dilaksanakan pada berbagai satuan lembaga/institusi. Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan jalur pendidikan nonformal dengan sistem pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal dengan berbagai nama lain diantaranya, *mass education*, *adult education*, *lifelong education*, *out-of-school education*, *social education*, dan lain-sebagainya merupakan satuan program kegiatan yang terorganisasi dan tersistemisasi diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirasa perlu ada suatu terobosan baru dari pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi era MEA melalui analisis kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan yang fokus pada pembentukan wirausaha agar tercipta usaha-usaha mandiri yang dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Pelatihan kewirausahaan diharapkan mampu membangun karakter wirausaha peserta pelatihan. Karakter wirausaha dirasa perlu untuk menunjang persaingan ekonomi agar setiap permasalahan dalam wirausaha mampu dihadapi secara bijaksana demi kelancaran dan kesuksesan program kegiatan wirausaha yang dijalani.

Salah satu hal yang mendorong peningkatan perekonomian suatu negara adalah semakin banyaknya wirausahawan. Jika negara tersebut memiliki wirausahawan banyak tentunya akan meningkatkan pemasukan yang besar pada sektor pajak, juga terjadinya pemerataan ekonomi di setiap wilayah di negara tersebut. Solusi atas permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat.

Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian/keterampilan (*softskill*), pengetahuan, pengalaman, dan/atau perubahan sikap individu. Secara yuridis, pelatihan dapat ditinjau dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan bagian dari pendidikan, hal yang membedakan diantara keduanya adalah pada tempat, waktu, dan pendekatannya.

Secara epistemologis, kajian tentang pelatihan dapat dikaji dalam pengembangan sistem, model, dan pengelolaan pelatihan. Dari segi sistem dipahami bahwa pada umumnya pelatihan mengandung unsur masukan (*input*), proses (*process*), dan keluaran (*output*). Karena pelatihan merupakan satuan dari pendidikan nonformal, maka pelatihan memiliki unsur-unsur yang terdiri atas konsep, proses, dan tujuan. Dilihat dari komponen pelatihan unsur-unsur yang ada dalam setiap pelatihan, Yuli Kartika Efendi (2017) menyebutkan komponen-komponen tersebut yaitu “jenis/tipe program, tujuan program, sasaran program, waktu program, kurikulum program, metode yang digunakan, media, dan evaluasi.”

Pelatihan wirausaha merupakan kunci pengembangan usaha yang mendorong individu mampu merencanakan, menciptakan, dan melaksanakan suatu program kegiatan usaha. Inovasi dan kreasi dibutuhkan untuk mengurangi jumlah pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomis. Semakin banyaknya pengusaha di suatu negara, maka akan semakin meningkatkan harkat sebagai bangsa yang mandiri dan bermartabat melalui kemandirian ekonomi.

Berwirausaha merupakan pilihan alternatif yang hendaknya menjadi kebutuhan bagi masyarakat demi mencapai kesejahteraan dan menghadapi permasalahan tingginya angka pengangguran. Melalui dampak berwirausaha, individu telah siap untuk mandiri secara ekonomi. Drucker dalam (Yunal dan Indriyani, 2013, hal.1 ) mengatakan berwirausaha merupakan kegiatan menghasilkan sesuatu yang baru, berpikir secara kreatif dan bertindak inovatif dalam mencapai suatu peluang yang ada.

Di era globalisasi saat ini, sangat perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kemandirian berwirausaha bagi perempuan sebagai wujud dari konsep pemberdayaan wanita. Salah satu lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan wanita adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang. Lembaga ini memiliki berbagai macam program pemberdayaan, salah satunya yaitu kegiatan menjahit pada kelompok usaha warga binaan. Program tersebut adalah salah satu program pemberdayaan wanita produktif melalui pendidikan kecakapan hidup berupa keterampilan (*vocational skills*). Keterampilan yang dilatih disesuaikan pada kebutuhan warga binaan difokuskan pada pelatihan menjahit yang menjadi salah satu program unggulan di Lapas Wanita Kelas II. Kelompok usaha ini produktif menghasilkan

produk keterampilan yaitu bermacam-macam karya kerajinan tangan seperti taplak meja, sarung galon, mukena, keset, pakaian wanita dan lain-lain.

Adapun tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja serta memanfaatkan peluang yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah wadah pembinaan terhadap warga binaan. Sebelum dikenal istilah Lapas, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lapas adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang statusnya masih dalam tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan.

Kota Tangerang adalah salah satu kota maju di Indonesia yang seringkali terjadi berbagai tindakan kriminalitas disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak merata, karena “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”. Tingginya angka pengangguran juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas di kota Tangerang.

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Maka dari itu, sangat penting pelatihan keterampilan dalam Lapas Wanita Kelas II A di Kota Tangerang ini dilaksanakan, agar para warga binaan yang menjalani hukuman dalam Lapas dapat tetap belajar dan mendapat kegiatan yang bermanfaat.

Penjelasan pada latar belakang di atas mendorong untuk dilakukannya penelitian mengenai wirausaha pada kelompok usaha di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang. Penelitian ini berupaya mengkaji kegiatan kelompok usaha tersebut, sehingga mampu menghasilkan wanita-wanita yang mandiri dan mampu memanfaatkan keterampilannya dalam berwirausaha.

## **1.2 Perumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan 389 warga binaan hanya 20 warga binaan saja yang mengikuti pelatihan menjahit. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- 1 Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang memiliki kegiatan pembinaan berupa pelatihan menjahit yang melatih wirausaha warga binaan untuk menjadi mandiri.
- 2 Kemandirian berwirausaha warga binaan berdasarkan kemampuan dalam berwirausaha yang dibentuk dari kegiatan program pendidikan dan pelatihan menjahit dengan strategi yang diterapkan dalam off the job training.
- 3 Kemandirian dalam berwirausaha warga binaan dapat tergambarkan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan menjahit.

### 1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai fokus masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kemandirian berwirausaha warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang?
2. Apakah benar program pendidikan pelatihan dan strategi penerapan warga binaan berkorelasi terhadap kemampuan dan kemandirian berwirausaha warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang?
3. Apabila benar, Seberapa besar nilai korelasi kemandirian berwirausaha warga binaan pada program pendidikan pelatihan dan strategi penerapan program pelatihan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang “Korelasi Program Pelatihan Menjahit terhadap Kemampuan Berwirausaha dan Kemandirian Berwirausaha Warga Binaan pada Kelompok Usaha Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang”.

Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan data tentang kemandirian berwirausaha warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang.

2. Untuk mengungkapkan tentang korelasi program pendidikan pelatihan dan strategi penerapan program pelatihan terhadap kemampuan dan kemandirian berwirausaha warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang.
3. Untuk mengungkapkan seberapa kuat korelasi program pendidikan pelatihan dan strategi penerapan program pelatihan terhadap kemampuan dan kemandirian berwirausaha di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat secara Teoritis**

Penelitian ini untuk memperkuat teori dari konsep program pendidikan dan pelatihan, teori konsep strategi penerapan program pelatihan, teori konsep kemampuan dan kemandirian yang diharapkan dapat berkontribusi pengembangan ilmu mengenai korelasi pendidikan dan pelatihan terhadap kemampuan dan kemandirian dalam berwirausaha warga binaan pada kelompok usaha produktif di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang.

### **1.4.2 Manfaat secara Praktis**

Adapun manfaat penelitian secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian dalam mengembangkan ilmu pendidikan pelatihan, strategi penerapan off the job training, kemampuan dan kemandirian dalam berwirausaha.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak lembaga pemasyarakatan Tangerang dalam meningkatkan program pembinaan yang berupa pelatihan dimasa yang akan datang.
3. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang bersangkutan yaitu warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan dalam Lapas.

## **1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka berikut ini sistematika penulisan yang berdasarkan pada pedoman penulisan Tesis UPI (2018:20-32) yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut :

Bab I: Berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah kemandirian berwirausaha, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II: Berisi tentang kajian teori, yang membahas konsep pendidikan dan pelatihan, konsep strategi penerapan program pelatihan, konsep kemandirian berwirausaha,

konsep warga binaan, dan konsep lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk dari bagian pendidikan luar sekolah.

Bab III: Berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan metode penelitian, hipotesis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel penelitian, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini serta teknik analisis data.

Bab IV: Berisi tentang temuan dan pembahasan penelitian tentang korelasi pendidikan dan pelatihan menjahit terhadap kemandirian berwirausaha warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang.

Bab V: Berisi tentang simpulan, implementasi dan rekomendasi tentang hasil temuan penelitian.